

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak itu ialah suatu instrumen kunci untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan ekonomi milik negara. Seiring dinamika ekonomi global yang makin ketat persaingannya, uang pajak menjadi sumber modal pembangunan dan pemulihan anggaran pasca pandemi. Di dalam dunia ekonomi modern, kemampuan kelola pajak jadi isu strategis sebab berkaitan langsung dengan kebolehan suatu badan usaha menekan beban pajak secara sah (*tax efficiency*) tanpa harus menurunkan ketaatan pada seluruh aturan yang ada. Implementasi manajemen pajak yang bagus bukan hanya cerminan taat fiskal, tapi juga efisiensi pengaturan finansial yang memberi kontribusi pada daya saing setiap perusahaan, terutama di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang bagi perekonomian Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuat beragam pembaruan lewat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Aturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang menjadi panduan baru bagi para pelaku UMKM. Akan tetapi, implementasi aturan itu membawa rintangan uniknya, terutama untuk sektor farmasi dan jasa kesehatan layaknya apotek, yang punya sifat transaksi yang rumit antara penyuplaian obat, servis jasa, serta manajemen persediaan barang. Tidak sedikit pelaku bisnis masih kurang optimal dalam menentukan skema pajak paling efisien di antara tiga pilihan tersedia, yaitu PP 55/2022 (PPH Final UMKM), sistem pembukuan utuh, juga Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Kenyataan ini tampak dari masih tingginya risiko kekeliruan dalam laporan pajak dan beban fiskal yang tidak seimbang dengan kapabilitas aktual usaha. Di dalam usaha Apotek Melina Farma Jaya, misalnya, belum ada sistem manajemen pajak yang terencana, sehingga penetapan mekanisme pajak belum juga dilakukan berdasar analisis efisiensi dan ketaatan.

Berbagai riset terdahulu mengindikasikan bahwa praktik kelola pajak yang benar bisa mempengaruhi efisiensi fiskal serta performa finansial suatu perusahaan. Contohnya, riset dari Sari dan Putra (2022) menyimpulkan bahwa kelola pajak berdampak sangat besar pada optimalisasi beban pajak di UMKM bidang jasa di Surabaya. Studi lainnya dari Nugraha (2021) mengindikasikan bahwa penentuan metode pembukuan bisa memangkas beban pajak sampai 15% ketimbang memakai norma hitungan. Akan tetapi, mayoritas riset yang lalu masih menitikberatkan sektor manufaktur dan niaga umum, sementara itu riset di sektor apotek serta layanan kesehatan sangat minim. Di samping itu, belum ada banyak studi yang secara gamblang mengomparasi kemampuan tiga aturan pajak—PP 55/2022, pembukuan, dan NPPN di dalam lingkup kelola pajak unit kecil. Hal inilah yang memicu adanya celah riset (*research gap*) yang harus diisi demi memperbanyak literatur tentang strategi kelola pajak yang sesuai dengan kekhasan sektor kesehatan.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis penerapan manajemen pajak pada Apotek Melina Farma Jaya, sebuah usaha farmasi berskala kecil-menengah di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada upaya merancang strategi manajemen pajak yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan karakteristik usaha, kapasitas administrasi, serta tiga opsi regulasi perpajakan yang berlaku.

Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengukur tingkat efisiensi beban pajak dan kepatuhan administrasi dari masing-masing opsi regulasi, sehingga dapat memberikan dasar empiris bagi penentuan strategi pajak yang paling optimal.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan soal kaitan antara implementasi kelola pajak dengan kemampuan manajemen beban fiskal, utamanya di ranah bisnis kecil sektor kesehatan. Di lain sisi, secara kegunaan, output studi ini dapat jadi pedoman bagi para pemilik apotek, konsultan pajak, dan pemerintah dalam menyusun regulasi perpajakan yang lebih luwes dengan kapabilitas administrasi UMKM. Jadi, penelitian ini tak hanya memberi andil bagi perkembangan literatur akuntansi pajak, melainkan juga memegang peran strategis untuk menunjang cita-cita pembangunan ekonomi nasional melalui perbaikan kepatuhan serta efisiensi fiskal para pelaku usaha.

Penelitian ini akan melakukan sesuatu yang konkret: data riil apotek dengan tiga skenario perhitungan (PP 55/2022, pembukuan, dan NPPN). Tujuannya sederhana, yaitu untuk mencari tahu mana skema yang memberikan beban pajak paling ringan namun tetap aman secara hukum bagi struktur biaya dan skala operasi apotek tersebut. Hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat teoretis, melainkan sebuah kalkulasi jernih yang bisa dijadikan dasar bagi pemilik apotek untuk mengambil keputusan finansial yang strategis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis untuk masalah pencatatan manual dan keterbatasan sumber daya, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di tengah dinamika perpajakan. Penelitian ini akan menggunakan data dari jurnal yang relevan dan peraturan resmi perpajakan Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah untuk merancang manajemen pajak yang efektif bagi Apotek Melina Farma Jaya dengan mempertimbangkan tiga opsi regulasi yang berlaku saat ini, yakni PP No. 55 Tahun 2022, sistem pembukuan, dan NPPN?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan yaitu merancang sebuah rekomendasi strategi perpajakan yang paling rasional dan bisa diterapkan oleh Apotek Melina Farma Jaya dengan merancang manajemen pajak yang efektif dengan mempertimbangkan regulasi PP 55/2022, pembukuan, dan NPPN agar sesuai dengan kondisi operasional apotek.

1.4. Kontribusi Penelitian

Secara mendasar, penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi Apotek Melina Farma Jaya sendiri, temuannya akan berfungsi sebagai panduan strategis yang bisa langsung dipakai. Ini adalah upaya untuk menerjemahkan kerumitan regulasi (PP 55/2022, pembukuan, dan NPPN) menjadi sebuah pilihan bisnis yang jernih, dengan tujuan akhir membebaskan sumber daya finansial yang selama ini mungkin terkikis oleh beban pajak yang tidak perlu atau kesalahan administrasi.